

Efektivitas Penerapan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Melalui Pola Satu Pintu pada BPSDM Provinsi Papua

Blasius Waluyo Sejati

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, Jl. Kotaraja Dalam No. 100, Kota Jayapura, Kodepos 99351

waluyo.sejati61@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

Article history

Received:

Agustus 30, 2021

Revised:

Oktober 26, 2021

Accepted:

November 13, 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Penerapan Pendidikan Dan Pelatihan pola satu pintu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purpose. Peneliti melakukan eksplorasi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan efektivitas penerapan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua. Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan telaah dokumen dan didukung dengan dokumen yang terkait, dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data meliputi data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification. Hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Selama ini dilihat dari segi pencapaian tujuan, Integrasi dan adaptasi belum sepenuhnya dikatakan efektif karena berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, oleh karena itu, guna menjawab berbagai permasalahan dalam mengefektifkan penerapan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua menurut pendapat penulis ditemukan bahwa diperlukan penerapan pola baru berupa kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua agar menerapkan pendidikan dan pelatihan tersebut dengan menggunakan pola satu pintu, serta diperlukan payung hukum yang tegas berupa peraturan Gubernur terkait penerapan pendidikan dan pelatihan pola satu pintu sebagai dasar penerapannya.

The study aims to find out how effective the single-door application of education and training patterns in the human resource development agency in the Province Of Papua. The research method used is a qualitative method, in which the researcher is as a key instrument, extracting a sample of the data source is done subjectively. Research conducted an excavation of what factors led to the effectiveness of education and training applications in the Papua Province of human resource development (BPSDM). Data collection and analysis techniques are done by studying the document and supported by the corresponding document, interactively and continuously. Analysis techniques data is reduction data, display data and conclusion data, verification/verification. Analysis has concluded that the implementation of education and training in the human resource development agency (BPSDM) of Papua Province has not been considered to be fully effective. because share in the problem with the human resource development agency (BPSDM) of Papua Province, therefore to answer the sharing of problems in administering education and training to the resource development agency (BPSDM) Papua Province is thought to be found that new patterns of single-door education and training policies are needed. Thus researchers recommend to the Papua Province Government to apply such education and training using a single-door pattern and a strict law umbrella of governor's regulations relating to the application of single-door education and training as a basic for application.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Kata Kunci: Kualitas kinerja, pendidikan dan pelatihan, penerapan, satu pintu

Keywords: Performance quality, education and training, one door

1. Pendahuluan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah unsur pendukung dalam tugas Pemerintahan Daerah di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai. Dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Secara garis besar pendidikan dan

pelatihan merupakan sebuah siklus kegiatan, terdiri atas: Analisis kebutuhan diklat, penentuan tujuan diklat, desain program, penyusunan kurikulum dan silabus, penyelenggaraan serta evaluasi. Siklus kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat peningkatan terus menerus (*continuous improvement*). Melibatkan banyak organisasi pelaksana daerah (OPD) sehingga berpotensi terjadinya duplikasi program, duplikasi kelompok sasaran, dan inefisiensi anggaran. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah membuat surat edaran tentang Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu.

Sesuai fakta di lapangan, diklat satu pintu belum berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala BPSDM Provinsi Papua bahwa pola diklat satu pintu tidak berjalan efektif disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait Diklat Satu Pintu sehingga pelaksanaan Diklat masih dilakukan secara parsial di masing-masing OPD, sehingga output yang dihasilkan belum efektif. Sejalan dengan itu, menurut Beni (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Di sisi lain, sarana dan prasarana kediklatan pada masing-masing OPD kurang memadai. Menurut Mulyasa (2003: 49), sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, pada proses belajar mengajar, yaitu: gedung pelatihan, ruang kelas, meja, kursi, serta peralatan dan media belajar mengajar. Sarana pendidikan dapat berperan baik ketika penggunaan sarana prasarana tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik secara optimal. Barnawi (2012: 47-48), mengatakan bahwa prasarana pendidikan merupakan seluruh perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung turut menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Menurut Agustina (2017) proses penyelenggaraan diklat dapat berjalan dengan lancar apabila ditunjang sarana prasarana yang baik dan sesuai dengan standar penyelenggaraan diklat.

Permasalahan lainnya ialah ketidak sesuaian antara sasaran program kediklatan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Padahal seharusnya hal yang paling terpenting dalam mengukur efektivitas program diklat dapat dilihat dari sejauh mana sasaran dan tujuan diklat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna.

Sejauh ini, penelitian terkait efektivitas penerapan diklat satu pintu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) belum penulis temukan. Penelitian yang ada masih masih terbatas pada program kediklatan itu sendiri yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agung (2019) tentang pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kediklatan, antara lain diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional, sudah berjalan efektif dengan tingkat kelulusan 100%. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan diklat pola satu pintu pada BPSDM Provinsi Papua dari perspektif rumusan kebijakan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah bagi pemerintah daerah dalam mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui pola satu pintu di Provinsi Papua, dan rekomendasi kebijakan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dalam mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan satu pintu di Provinsi Papua.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus Efektivitas Penerapan Pendidikan dan Pelatihan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua. Menurut (Sugiyono, 2011) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positive* digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purpose*. Peneliti melakukan eksplorasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas penerapan pendidikan dan pelatihan pada BPSDM Provinsi Papua. Dalam proses memperoleh data dilakukan wawancara mendalam terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam hal ini BPSDM Provinsi Papua, intansi pengirim peserta Diklat dalam hal ini OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dan *steakholder* lainnya.

Kemudian dilakukan pembuatan transkrip wawancara dan menjadi data yang berupa teks yang lebih mudah untuk diproses selanjutnya. Kemudian dilakukan analisis data dengan mereduksi data sehingga lebih mudah dipahami dan didukung dengan dokumen yang terkait, analisis keterkaitan data setiap kategori dan hubungannya dengan kategori yang lain. Adapun informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Informan penelitian

No	Informan	Jabatan	Jumlah	Kode Informan
1	Dr. M. Ridwan, M.Si	Asiastan III Bidang Umum Setda Provinsi Papua	1	I ₁
2	Aryoko A.F. Rumaropen, SP., M.Eng	Kepala BPSDM Prov. Papua	1	I ₂
3	Dr. Frans Pekey, M.Si	Sekda Kota Jayapura	1	I ₃
4	Anthony M. Mirin, S.Sos	Sekretaris BPSDM Prov. Papua	1	I ₄
5	Marthen Kogoya	Kabid Pengembangan BKD Prov. Papua	1	I ₅
6	Emanuel Korey, S.Sos, M.Si	Kabid Diklat Teknis dan Fungsional BPSDM Prov. Papua	1	I ₆
7	Drs. Burhanuddin, M.Si , Anton Yoas Imbenai, S.Ag, M.Si	Widyaiswara	2	I ₇
8	Gustaf Bernard Rumkorem, S.H., M.Si Agus Sumarsono, S.Sos, MMT Mateus Rawar, SE., M.AP Rudolf Rumbino, ST., MT Revelin Octaviani, SP, M.Si	Alumni peserta diklat	5	I ₈

Dari tabel tersebut jumlah informan seluruhnya 13 orang. Setelah memperhatikan apa yang ingin diketahui dengan data dan informasi yang dibutuhkan, sesuai dukungan sumber daya yang dimiliki informan dan peneliti serta setelah terjadinya pengulangan informasi dari informan ke informan. Informan akhir yang berhasil diwawancarai sebanyak 12 orang, diantaranya terseleksi menjadi informan kunci sebanyak 5 (lima) orang karena mereka memenuhi kriteria *Good Informants*.

Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan telaah dokumen. Kemudian Analisis data dengan mereduksi data sehingga lebih mudah dipahami dan didukung dengan dokumen yang terkait, analisis keterkaitan data untuk setiap kategori dan hubungannya dengan kategori yang lain. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2011) teknik analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas BPSDM Provinsi Papua dalam menyelenggarakan Diklat bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, maka peneliti telah menggali informasi melalui wawancara serta mengaitkan dengan menggunakan teori yang dikemukakan Duncan (dalam Steers, 1985:53), yaitu dengan melihat pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan di bawah ini:

3.1. Penerapan Pendidikan dan Pelatihan pada BPSDM Provinsi Papua

Dari segi pencapaian tujuan penerapan pendidikan dan pelatihan teknis di Provinsi Papua yang dilaksanakan selama ini menurut pengamatan peneliti pada saat di lapangan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dan pencapaian sasaran/target yang telah ditentukan belum dapat diukur. Dimana waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di BPSDM Provinsi Papua belum sepenuhnya tertib dikarenakan pelaksanaan diklat selama ini dilaksanakan secara parsial pada OPD masing-masing dan sangat jarang melibatkan BPSDM Provinsi Papua yang merupakan lembaga yang berkompeten. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Aryoko A.F. Rumaropen, SP., M.Eng selaku Kepala BPSDM Provinsi Papua mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis selama ini masih belum tertib dikarenakan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakannya dengan cara sendiri-sendiri, bahkan ironisnya BPSDM selaku lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan terkadang tidak mendapat laporan pelaksanaannya, sehingga hasil dari pelaksanaan diklat tersebut tidak dapat diukur yang mengakibatkan penyelenggaraannya tidak efektif”

Memandang uraian dan pernyataan tersebut untuk mengukur pencapaian tujuan dari BPSDM itu sendiri sangatlah sulit dikarenakan pelaksanaannya selama ini parsial dilakukan di masing-masing OPD sehingga BPSDM Provinsi Papua tidak memiliki data yang memadai terkait diklat-diklat apa saja yang telah dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari data penyelenggaraan diklat yang

terregister yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Papua dari lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kegiatan kediklatan BPSDM Provinsi Papua tahun 2016-2020

No	Jenis kegiatan	Waktu pelaksanaan	Jumlah peserta	Keterangan
1.	Diklat Teknis Fungsional Akuntansi Keuangan Daerah	9 Mei s.d 13 Mei 2016	42 Orang	Lulus
2.	Diklat TOT Substansi WI	2 Mei s.d 14 Mei 2016	40 Orang	Lulus
3.	Diklat TOC bagi Penyelenggara (BPSDM)	10 Juli s.d 14 Juli 2017	30 Orang	Lulus
4.	Diklat Pengelolaan Aset		38 Orang	Lulus
5.	Diklat Teknis Penyusunan Lakip	15 Okt s.d 19 Okt 2019	27 Orang	Lulus
6.	Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran	9 Okt s.d 2 Nov 2019	24 Orang	Lulus
7.	Diklat TOT Substansi bagi WI	4 Nov s.d 8 Nov 2019	22 Orang	Lulus
8.	Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota	28 Okt s.d 31 Okt 2019	25 Orang	Lulus
9.	Workshop Pengembangan Kompetensi PNS	13 Nov s.d 16 Nov 2018	46 Orang	Kerjasama antara BPSDM Provinsi Papua dengan P3D LAN RI
10.	Diklat Kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	22 Maret s.d 26 Maret 2020	80 Orang	Lulus
11.	Diklat MOT bagi Pengelola Diklat	16 Nov s.d 4 Des 2020	23 Orang	Lulus

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pelaksanaan diklat yang terdata oleh BPSDM Provinsi Papua hanya 11 (sebelas) kediklatan. Hal tersebut apabila dilihat dari segi kuantitas sangatlah kurang, padahal menurut pengamatan peneliti di lapangan ditemukan adanya banyak diklat yang diselenggarakan dari periode 5 tahun terakhir, hanya saja diselenggarakan parsial oleh masing-masing OPD. Untuk memastikan fakta tersebut peneliti berinisiatif mencari data-data diklat yang diselenggarakan di OPD, namun tidak satupun informan yang dapat memberikan penjelasan terkait data tersebut sehingga peneliti mencoba mewawancarai salah satu pejabat Pemerintah Provinsi Papua yaitu Bapak Dr. M. Ridwan, M.Si selaku Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua yang membenarkan pernyataan sebelumnya dengan mengatakan: “terkait data penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh OPD disinilah letak titik masalahnya, kami sangat sulit menertibkannya karena belum ada regulasi yang benar-benar mengatur terkait pengelolaan diklat yang seyogyanya dipusatkan pada BPSDM, sehingga hal wajar apabila Bapak tidak menemukan data yang Bapak cari”

Dari beberapa hasil wawancara serta data dan pengamatan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diklat yang diselenggarakan secara parsial di masing-masing OPD dapat dikatakan masih kurang efektif karena sebagian besar OPD tidak berkoordinasi dengan BPSDM Prov. Papua sehingga tidak dapat diukur pencapaian tujuan dari diklat tersebut.

Dilihat dari segi integrasi, yang mana dijelaskan integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam hal ini adalah BPSDM Prov. Papua untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan BPSDM Prov. Papua maka BPSDM Prov. Papua telah mensosialisasikan beberapa diklat-diklat yang menjadi program BPSDM Prov. Papua sebelum diklat dilaksanakan dengan tujuan memberikan gambaran kepada OPD mengenai tujuan, manfaat diklat tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Emanuel Korey, S.Sos, M.Si selaku Kabid Diklat Teknis dan Fungsional BPSDM Prov. Papua menyatakan bahwa : “Kami selalu melaksanakan sosialisasi kepada para kepala OPD secara terus menerus dengan menjelaskan maksud dan tujuan serta manfaat yang akan diperoleh dari mengikuti kegiatan diklat sehingga diharapkan para kepala OPD mempunyai gambaran yang cukup jelas mengenai diklat apa yang akan diselenggarakan yang diharapkan para kepala OPD bisa mengikut sertakan staf. Namun kenyataannya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan tidak semua kepala OPD

mengikutsertakan staf OPDnya dengan alasan mereka mengganggu pelaksanaan diklat pada OPD masing-masing”.

Lanjut Bapak Anthony M. Mirin, S.Sos selaku Sekretaris BPSDM menyampaikan bahwa: “Hal ini menjadi tantangan bagi BPSDM untuk melakukan pendekatan agar pemahaman instansi pengirim peserta diklat justru merasa terbantu untuk melakukan perubahan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pegawai yang dikirim. Oleh karena itu, perlu kiranya pengelola diklat dalam hal ini BPSDM untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi pengirim peserta diklat. Hal ini dilakukan agar terdapat kerjasama yang baik antara pengelola, peserta, dan kantor peserta diklat” Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa BPSDM Prov. Papua sudah melaksanakan sosialisasi dan sudah berjalan dengan optimal namun kurangnya kesadaran dan partisipatif dari kepala OPD.

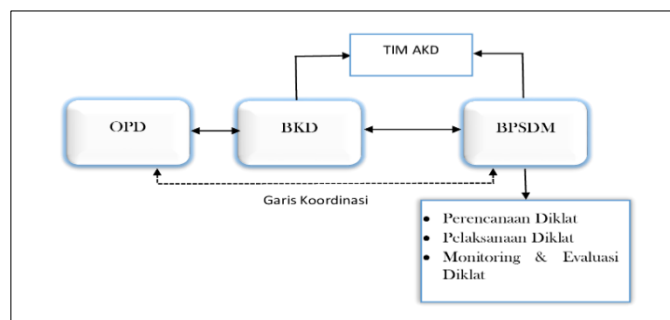
Dilihat dari segi adaptasi yang mana merupakan proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan sesuatu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Adapun perubahan-perubahan dimaksud ialah berubahnya pola baru kediklatan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal kediklatan namun fakta di lapangan ditemukan bahwa pada pemerintah Prov. Papua masih menggunakan pola lama yang tidak sesuai lagi dengan model diklat masa kini. Adanya perubahan-perubahan regulasi ternyata tidak dipahami dan dicermati dengan baik oleh stakeholder di lingkungan pemerintah Prov. Papua. Padahal seyogyanya stakeholder merupakan kunci keberhasilan dari kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan diterapkan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Aryoko A.F. Rumaropen, SP., M. Eng selaku Kepala BPSDM Provinsi Papua menuturkan bahwa “stakeholder merupakan kunci diterapkannya diklat pola baru pada BPSDM Papua baik itu atas kerjasama dengan OPD selaku pengirim peserta dengan BPSDM Provinsi Papua selaku penyelenggara diklat”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan diklat masih menggunakan pola lama dikarenakan para stakeholder yaitu penentu kebijakan tidak ada kemauan dan keseriusan dalam mengubah kebiasaan yang lama padahal tidak lagi sesuai dengan perkembangan masa kini sehingga pelaksanaannya pun tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan Diklat pada BPSDM Provinsi Papua selama ini, baik itu dilihat dari segi pencapaian tujuan, integrasi maupun adaptasi, belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, guna mengefektifkan program diklat pada BPSDM Provinsi Papua perlu penerapan pola baru berupa kebijakan Diklat Pola Satu Pintu.

3.2. Model Penerapan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu

Untuk mengefektifkan program Diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua dan sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*, maka BPSDM Provinsi Papua perlu menyelenggarakan kediklatan terutama yang teknis dan fungsional secara terpusat dan terstandarisasi melalui kebijakan satu pintu. Adapun model penerapan diklat pola satu pintu yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi semuanya terpusat pada BPSDM Provinsi Papua sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 1. Grand desain model diklat pola satu pintu BPSDM Provinsi Papua

Berdasarkan gambar 1 *Grand Desain Model Diklat Pola Satu Pintu BPSDM Prov. Papua* dapat dijelaskan mekanisme penyelenggaraannya sebagai berikut: (1) OPD Mengajukan program diklat sesuai kebutuhannya kepada BKD, (2) BKD bersama dengan BPSDM membentuk Tim Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disebut (TAKD) guna menganalisis kebutuhan diklat berdasarkan pengajuan dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, setelah itu BKD menyeleksi/menetapkan peserta diklat sesuai kualifikasi peserta diklat berdasarkan analisis kebutuhan diklat (3) hasil dari analisis kebutuhan diklat tersebut dijadikan dasar untuk membuat program Diklat yang nantinya akan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sehingga diharapkan agar perencanaannya sudah sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, (4) setelah tahapan perencanaan sudah sesuai maka BPSDM Provinsi Papua menyiapkan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan pada

saat pelaksanaan Diklat antara lain membentuk kepanitian diklat, menyiapkan tenaga pendidik/ Widyaiswara yang sesuai dengan kompetensinya, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya, (5) tahapan terakhir BPSDM Provinsi Papua melaksanakan monitoring serta mengevaluasi hasil dari pelaksanaan diklat yang telah diselenggarakan guna untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang kiranya dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan serta perbaikan yang lebih baik pada saat pelaksanaan Diklat berikutnya.

Dari penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan pendapat Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengenai ukuran efektivitas dalam hal ini terkait efektivitas penerapan pendidikan dan pelatihan pola satu pintu pada BPSDM Provinsi Papua, yang dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi dapat diuraikan sebagai berikut: dalam hal pencapaian tujuan sebagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pola satu pintu di BPSDM Provinsi Papua untuk dapat mengukur seberapa efektif pelaksanaannya dapat dilihat dari seberapa jauh pencapaian tujuannya, dengan diterapkannya diklat pola satu pintu yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi terpusat di BPSDM Provinsi menurut pengamatan penulis dengan dipusatkannya tiga item tersebut tentu saja dapat mengefektifkan penyelenggaraannya karena untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan tahapan perencanaan yang matang karena perencanaan merupakan pemandu dalam berbagai aktivitas, mengingat perencanaan sebagai pemandu maka perencanaan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan diselenggarakannya Diklat Pada BPSDM Provinsi Papua sehingga mempermudah dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan diklat yang akan diselenggarakan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Hal tersebut sesuai dengan pandangan menurut Richard L. Daft (2010:212), mengemukakan bahwa perencanaan berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi dimasa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.

Kemudian setelah proses perencanaan sudah dilaksanakan dan telah disusun program diklat sesuai analisis kebutuhan diklat tersebut, maka dipandang dari sisi tahapan pelaksanaan yang dimana dalam hal ini pada pola satu pintu yang juga dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Papua yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan diklat yang memiliki standarisasi baik itu dari segi tenaga pengajar yang terqualifikasi serta sarana dan prasarana yang memadai, serta penentuan tempat dan waktu pelaksanaannya dengan baik dan terstruktur, maka dari segi pelaksanaannya dilakukan usaha-usaha yang lebih maksimal sehingga dapat berjalan secara efektif dan tentunya akan tercapai tujuan dari diselenggarakannya diklat oleh BPSDM Provinsi Papua. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Aryoko A.F. Rumaropen, SP., M. Eng selaku Kepala BPSDM Provinsi Papua menuturkan bahwa "apabila pelaksanaan diklat sepenuhnya terpusat di BPSDM tentunya akan berjalan secara maksimal karena kita punya widyaiswara yang berkompeten serta fasilitas yang memadai".

Berdasarkan uraian dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan diklat yang terpusat pada BPSDM Provinsi Papua apabila pelaksanaannya dilaksanakan melalui pola satu pintu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pastinya akan berjalan secara efektif.

Untuk lebih memaksimalkan pencapaian dari tujuan dilaksanakannya diklat pada BPSDM Provinsi Papua maka pada tahap setelah pelaksanaan diklat pada pola satu pintu sendiri apabila telah dilaksanakan diklat maka dilakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan diklat itu sendiri menurut Hamalik (2007), tujuan dari evaluasi diklat adalah: a. Untuk menentukan tingkat kemajuan/hasil belajar para peserta diklat. b. Untuk menempatkan para peserta ke dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan, minat dan karakteristik peserta. c. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Artinya tujuan umum dari evaluasi diklat agar apa yang telah dilaksanakan akan lebih baik lagi disisi lain evaluasi diklat merupakan suatu proses pengumpulan informasi deskriptif secara sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan pelatihan yang efektif terkait dengan seleksi, adopsi, nilai dan modifikasi aktivitas pembelajaran yang bervariasi Werner dan De Simone, (2006:233).

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa evaluasi sangat diperlukan karena bertujuan untuk memperbaiki apa-apa yang kurang dalam pelaksanaannya maupun perencanaannya sehingga dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan diklat tersebut.

Kemudian dari segi adaptasi untuk merubah pola-pola lama yang selama ini sudah berjalan dan diterapkan dalam pelaksanaan diklat di lingkungan Provinsi Papua yang dimana selama ini pelaksanaan diklat yang umumnya dilaksanakan secara parsial pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, untuk mendukung penerapan diklat pola satu pintu yang dimana perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya terpusat pada BPSDM Provinsi Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang salah satunya mengamatkan adanya perubahan pola baru pada penyelenggaraan diklat, maka diperlukan payung hukum berupa Peraturan Gubernur Papua yang lebih teknis mengatur penyelenggaraan diklat pola satu pintu tersebut. Bapak Anthony M. Mirin, S.Sos selaku Sekretaris BPSDM menuturkan terkait regulasi peraturan menyampaikan bahwa: "kebijakan diklat pola satu pintu pada BPSDM Provinsi Papua sangat perlu dibuatkan regulasi peraturan berupa Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur kebijakan tersebut yang sifatnya memaksa"

Selanjutnya dari segi integrasi yang mana dijelaskan integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam hal ini adalah BPSDM Prov. Papua untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, apabila penerapan diklat dilaksanakan melalui pola satu pintu pada BPSDM Provinsi Papua, sesuai dengan uraian sebelumnya komunikasi antara OPD, BKD serta BPSDM akan berjalan secara maksimal karena dalam penerapan pola satu pintu melibatkan beberapa unsur dalam merumuskan kebijakan program diklat khususnya. Berdasarkan uraian model penerapan Diklat Pola Satu Pintu pada BPSDM Provinsi Papua yang dimana tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya terpusat di BPSDM Provinsi Papua serta dikaitkan dengan ukuran efektivitas menurut ahli yaitu pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan pola kebijakan satu pintu tersebut efektif apabila diterapkan.

4. Kesimpulan & Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Diklat pada BPSDM Provinsi Papua selama ini baik itu dilihat dari segi pencapaian tujuan, integrasi maupun adaptasi belum sepenuhnya efektif karena berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Provinsi Papua antara lain penyelenggaraan diklat yang dilakukan secara parsial di masing-masing OPD. Keberhasilannya belum dapat diukur karena belum adanya standarisasi penilaian keberhasilan OPD dan tidak dilibatkannya BPSDM Provinsi Papua sebagai pemilik kinerja pendidikan dan pelatihan. Disisi lain, pelaksanaan kediklatan pada masing-masing OPD tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai, serta tidak padu serasinya antara program diklat dengan kebutuhan pengguna. Padahal, variabel terpenting dalam mengukur efektivitas program diklat adalah sejauh mana sasaran dan tujuan diklat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan pengguna.

Dalam mengefektifkan penerapan diklat pada BPSDM Provinsi Papua menurut pendapat penulis perlunya penerapan pola baru berupa kebijakan Diklat Pola Satu Pintu yang telah dibahas secara rinci pada bab sebelumnya. Sehingga model penerapan Diklat Pola Satu Pintu pada BPSDM Provinsi Papua, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta dikaitkan dengan ukuran efektivitas menurut ahli yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, maka penerapan pola kebijakan satu pintu akan menjamin efektifitas penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini menghasilkan suatu masukan, saran dan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Papua khususnya pada BPSDM Provinsi Papua untuk menerapkan kebijakan diklat pola baru yaitu penerapan diklat pola satu pintu, yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur Papua, sehingga bersifat memaksa OPD untuk mematuhi.

Daftar Referensi

- Barnawi & M. Arifin. 2012. Manajemen Sarana dan Prasarana sekolah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media..
- Hamalik, Oemar. 2007. Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya).
- Pekei, Beni 2016. "Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Ekonomi" Jakarta : Taushiah
- Richard L. Daft. 2010. Era Baru Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat).
- Steers, M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Werner, J.M. & Randy L. De Simone (2006). Human Resources Development. USA: Thomson
- Agustina Rahmawati. 2017. Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 1 (2) : 104-121.
- M. Agung Maulana. 2019. Pelaksanaan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bpsdm) Provinsi Riau Tahun 2016. JOM FISIP, 6 (1): 1-12.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]